

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep Indo-Pasifik sebagai konstruksi geografis dan strategi dalam diskursus hubungan internasional kontemporer mulai mengalami popularitas sejak 10 tahun yang lalu di negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat (AS), Australia, India, dan beberapa negara Asia Tenggara (Heiduk & Wacker, 2020). Banyak pihak yang melihat banyak konsep ini telah sebagian menggantikan konsep “Asia-Pasifik”, dan konsep ini telah masuk ke dalam dokumen-dokumen resmi pemerintahan, retorika elit pemerintahan, dan menjadi pembahasan di dalam kajian-kajian lembaga riset dan akademis. Signifikansi konsep Indo-Pasifik dalam diskursus hubungan internasional, terutama dalam konteks geopolitik dan geoeкономи disebabkan oleh kedua samudera yang merupakan jalur penting perdagangan dunia dan suplai energi bagi banyak negara, dan menjadi arena persaingan dua kekuatan besar dunia yaitu AS dan Tiongkok. Penggunaan istilah Indo-Pasifik dalam politik luar negeri dimulai oleh Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe pada tahun 2007 dalam pidatonya di New Delhi, dan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dalam konteks *Pivot to Asia* milik AS. Kemunculan resmi pertama Indo-Pasifik dimulai oleh Australia yang menerbitkan *white paper* berjudul “Australia in Asian Century” pada tahun 2012 silam. Bagi banyak ahli strategi dan akademisi, wilayah Indo-Pasifik terbentang dari India di barat hingga Amerika Serikat di timur dan Jepang di utara hingga Australia di selatan. Meskipun demikian, konsepsi atas “Indo-Pasifik” memiliki makna yang berbeda-beda, dikarenakan konsepsi tersebut dipengaruhi oleh pandangan dan kepentingan masing-masing aktor.

Secara sekilas, Jerman tidak punya wilayah teritori di Samudera Hindia maupun Samudera Pasifik, seharusnya tidak punya kepentingan untuk terlibat di dalam dinamika yang terjadi di kawasan Indo-Pacific. Meskipun demikian, berdasarkan tulisan Taussig (2019), Jerman memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. wilayah tersebut merupakan prioritas di luar Eropa bagi banyak perusahaan Jerman, mengingat ekspor Jerman ke wilayah tersebut selama 2008-2018 meningkat dengan rata-rata lebih dari 7 persen per tahun, dan pasar Asia-Pasifik menerima 17 persen dari seluruh Jerman ekspor selama paruh pertama tahun 2018. Pentingnya kawasan tersebut bagi perekonomian Jerman juga terlihat dari usaha untuk menurunkan hambatan perdagangan, seperti lewat EU-Japan Economic

Partnership Agreement. Dimensi keamanan juga menjadi salah satu kepentingan Jerman di wilayah tersebut, terutama kaitannya dengan sikap asertif dari Tiongkok, mengingat adanya potensi konflik antar aktor regional bisa menjadi mengacaukan jalur laut vital yang memiliki dampak negatif bagi perekonomian Eropa (Taussig, 2019). Meskipun demikian, hingga tahun 2019, kehadiran militer Jerman masih sangat minim. Wilayah Indo-Pasifik juga menjadi tempat dua mitra penting bagi Jerman. Jepang dilihat oleh Jerman sebagai mitra penting dan memiliki *shared interest* berupa pentingnya menjaga stabilitas dan *rule-based order* di kawasan. Dalam aspek kerja sama, kedua negara lebih memprioritaskan kerja sama ekonomi dibandingkan keamanan, dikarenakan sejarah kedua negara yang menumbuhkan sentimen ketidakpercayaan pada militerisme. Selain Jepang, India merupakan negara yang menjadi perhatian Jerman untuk memperkuat kemitraannya, mengingat India dianggap sebagai negara yang penting dari aspek lokasi geostrategis, ukuran, pemerintahan yang demokratis, dan ekonomi pasar yang kuat (Taussig, 2019).

Perubahan dinamika hubungan antara Jerman dengan Tiongkok dapat dibilang merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi keputusan dan persepsi Jerman mengenai Indo-Pasifik. Jerman sendiri mulai melakukan hubungan erat dengan Tiongkok pasca berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet yang memungkinkan Jerman untuk dapat lebih terlibat dengan negara-negara di luar area Eropa. Mempererat hubungan dengan Tiongkok, terutama melalui hubungan ekonomi dan mengintegrasikannya ke dalam ekonomi global diharapkan mampu membuat Tiongkok lebih kaya dan lebih liberal, yang disebut dengan “perubahan melalui perdagangan”. Jerman berharap melalui strategi tersebut, Tiongkok dapat mereformasi sistem politiknya, namun harapan ini pupus dikarenakan tidak adanya perubahan dalam sistem politik Tiongkok dan malah membuatnya semakin bersifat konfrontasional ke Barat (Ulatowski & Hills, 2022). Meningkatnya kekuatan Tiongkok secara pesat, ditambah dengan sikap Tiongkok yang menentang tatanan internasional liberal membuat khawatir Jerman yang merupakan negara demokrasi liberal. Selain itu, isu-isu seperti Hong Kong, Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan juga membuat keduanya saling bertentangan. Berbagai isu ini membuat hubungan kedua negara semakin menjauh, dan kerja sama ekonomi yang menjadi pilar utama hubungan kedua negara menjadi terdampak. Hal ini terlihat dari sifat Jerman yang semakin berhati-hati dalam kerja sama ekonomi dengan Tiongkok, seperti Jerman yang tergabung dalam Asian Infrastructure Investment Bank, namun menolak untuk ikut serta dalam *Belt and Road Initiative* (Ulatowski & Hills, 2022).

Menanggapi dinamika tersebut, pada akhir 2020 silam, pemerintah Jerman secara resmi mengeluarkan dokumen panduan kebijakan Indo-Pasifik. Pada bagian pembukaan dari dokumen tersebut, Menlu Heiko Maas (dalam Bundesregierung, 2020) mengatakan bahwa wilayah Indo-Pasifik merupakan wilayah yang penting secara ekonomi dan politik, dan merupakan arena dari persaingan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Keterlibatan Jerman di wilayah ini dipandang beliau sangat penting dalam menjaga kemakmuran masyarakat Jerman, mengingat Jerman sangat bergantung pada keterbukaan jalur pelayaran, konektivitas fisik dan digital, dan partisipasi dalam pasar pertumbuhan yang berfungsi. Selain itu Maas juga mengatakan bahwa Jerman merupakan proponent konsep *rule-based order* di wilayah Indo-Pasifik, dan mengedepankan pendekatan normatif dan institusional di wilayah tersebut. Pendekatan multilateralisme juga menjadi perhatian Jerman di wilayah Indo-Pasifik dengan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dilihat sebagai salah satu pendekatan struktural yang menjanjikan, dan juga mengedepankan kerja sama dengan ASEAN. Bukti keterlibatan konkret Jerman di wilayah Indo-Pasifik adalah pengerahan kapal fregat Bayern ke Tanduk Afrika, Australia, dan Jepang selama sekitar setengah tahun, dari Agustus 2021 hingga Februari 2022. Berdasarkan laman resmi Bundeswehr, misi Bayern adalah salah satu kebijakan diplomasi dan keamanan, termasuk melakukan latihan bersama dengan mitra Jerman di kawasan, seperti angkatan laut Australia, Singapura, Jepang, dan AS; tujuan lain pelayaran ini juga untuk menunjukkan bahwa Jerman akan mendukung mitra internasionalnya dalam hal mengamankan kebebasan rute laut dan menegakkan hukum internasional di kawasan Indo-Pasifik (Bundeswehr, t.t.)

Mengikuti langkah Jerman, Perancis, dan Belanda yang terlebih dahulu memiliki kebijakan atau strategi Indo-Pasifik, Uni Eropa (UE) pada September 2021 akhirnya mengeluarkan strategi Indo-Pasifik. Dalam *joint communication* kepada European Parliament dan European Council, Indo-Pasifik disebutkan memiliki pertumbuhan ekonomi, demografi, dan bobot politik yang menjadikannya pemain kunci dalam membentuk tatanan internasional dan mengatasi tantangan global. UE di dalam kebijakan tersebut bermaksud untuk meningkatkan keterlibatannya dengan kawasan Indo-Pasifik untuk membangun kemitraan dalam rangka memperkuat tatanan internasional berbasis aturan (European Commission, 2021). Sebelumnya, pembahasan mengenai Indo-Pasifik di pembuat kebijakan UE dapat terbilang sangat minim, meskipun wilayah ini sangat vital bagi Eropa (Kugiel, 2019). Dikeluarkannya keputusan ini merupakan hasil dari dorongan Jerman bersama Perancis dan Belanda, dalam rangka membuat kebijakan Indo-Pasifik bersama di tingkat UE (The Federal Government, 2021). Secara

tekstual, kebijakan UE memiliki persamaan dengan kebijakan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh pemerintah Jerman. Persamaan ini terlihat dari keduanya yang mengedepankan sentralitas ASEAN sebagai aktor regional yang memiliki peran besar dalam menjaga kestabilan dan keamanan di wilayah Indo-Pasifik. Keduanya juga mengidentifikasi Tiongkok sebagai *concern* maupun sebagai aktor yang sangat berpengaruh di Indo-Pasifik.

Sesuai dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa ASEAN merupakan mitra penting di kawasan Indo-Pasifik. Sejak Desember 2020, UE dan ASEAN telah meningkatkan hubungan kedua organisasi menjadi Kemitraan Strategis. Menurut Heiko Maas, Kemitraan Strategis tersebut mewakili keyakinan bersama dalam multilateralisme; tidak ada negara yang harus dipaksa untuk memutuskan antara dua kutub, dan Kemitraan Strategis berarti bersama-sama mengadvokasi kepentingan UE dan ASEAN bersama (Federal Foreign Office, 2020). Jerman dan ASEAN menegaskan kembali komitmen keduanya untuk hubungan kemitraan yang lebih kuat pada Pertemuan ASEAN-Germany Development Committee (AG-DPC) Kelima November 2021 silam. Pada Pertemuan tersebut, ASEAN dan Jerman menyambut baik kerja sama yang berkembang antara kedua belah pihak di tiga pilar Komunitas ASEAN, dan membahas pentingnya pendalaman kerja sama melalui program dan inisiatif regional dalam beberapa area (ASEAN, 2021). Pendalaman kerja sama difokuskan dalam beberapa area, yaitu (i) perdamaian dan keamanan maritim; tata pemerintahan yang baik dan hak asasi manusia; kerja sama perdagangan dan investasi; kerja sama pangan, pertanian dan kehutanan; ketahanan energi; inovasi dan teknologi; pendidikan; pertukaran budaya dan kerja sama lingkungan dan perubahan iklim; pendidikan dan pelatihan kejuruan teknis; penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan; pengentasan kemiskinan; dan dukungan untuk mempersempit kesenjangan pembangunan dan inisiatif untuk integrasi ASEAN. Kemitraan Strategis dengan ASEAN juga merupakan langkah penting dalam mengimplementasikan kebijakan Indo-Pasifik Jerman, dan memperkuat *rule-based order* di kawasan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Apa yang menjadi dasar pola Republik Federal Jerman dalam melakukan *engagement* di kawasan Indo-Pasifik, yang mana sejauh ini Jerman telah melakukan *engagement* multilateral dengan beberapa negara Indo-Pasifik dan ASEAN, dan telah mengerahkan sebuah kapal perang ke kawasan tersebut?

1.3 Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai keterlibatan dan kehadiran Jerman di kawasan Indo-Pasifik mulai prominen pasca diterbitkannya dokumen *Policy guidelines for the Indo-Pacific* pada akhir tahun 2020 silam. Meskipun demikian, kajian yang diterbitkan sebelum dikeluarkannya dokumen tersebut sudah ada. Torrey Taussig (2019) berargumen bahwa *engagement* Jerman di kawasan Indo-Pasifik masih terbilang kurang memadai, mengingat signifikansi kepentingan Jerman di wilayah itu. Jerman yang memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan kawasan di Indo-Pasifik dianggap kurang serius dalam menanggapi dinamika yang ada seperti sikap Tiongkok di kawasan tersebut. Hal ini dikarenakan Jerman memiliki kehadiran militer yang sangat minim di daerah tersebut. Pasca diterbitkannya dokumen *Policy guidelines for the Indo-Pacific*, banyak ahli yang mulai memberikan pendapat mengenai aspek-aspek dari panduan tersebut, seperti latar belakang kepentingan dan kaitannya dengan strategi Indo-Pasifik dari negara-negara Eropa lainnya. Berdasarkan tulisan Frédéric Grare (2020) dalam *Internationale Politik Quarterly*, motivasi Jerman mengeluarkan panduan kebijakan tersebut adalah bukan untuk *vis-à-vis* menghadapi Tiongkok, namun merupakan konsekuensi dari perkembangan negatif hubungan Jerman-Tiongkok, ketidakpuasan atas penanganan pandemi COVID-19 oleh Tiongkok, dan meningkatnya ketergantungan Eropa terhadap komoditas krusial dari Tiongkok (Grare, 2020). Selain itu, juga disebutkan bahwa pengeratan kerja sama dengan ASEAN merupakan manifestasi dari kepentingan ekonomi Jerman, namun aspirasi tersebut juga dilihat bahwa Jerman bertindak cukup ambivalen dalam aspek multilateralisme dan keamanan, terutama jika dibandingkan dengan negara Eropa lain seperti Perancis yang juga mempunyai strategi Indo-Pasifik. Meskipun demikian, sebagai negara Eropa kedua setelah Perancis yang secara resmi mengeluarkan strategi Indo-Pasifik, Grare (2020) melihat bahwa Jerman ingin negara-negara UE untuk ikut serta dalam membentuk strategi Indo-Pasifik UE.

Kajian lain mengenai keterlibatan Jerman di Indo-Pasifik adalah perbandingan mengenai strategi Jerman dengan Perancis. Menurut Duchâtel & Mohan (2020) dari Institut Montaigne, ada beberapa perbedaan yang cukup terlihat di antara keduanya. Jerman dilihat menginginkan *engagement* yang lebih luas di kawasan Indo-Pasifik dengan kerja sama ekonomi, konektivitas digital, dan perubahan iklim; sedangkan Perancis lebih berfokus pada keamanan dan *rule-based order*. Pola *engagement* kedua juga memiliki perbedaan berupa Jerman yang mencoba untuk melakukan diversifikasi kemitraannya di kawasan di luar China, seperti peningkatan kemitraan dengan ASEAN. Perancis di sisi lain mengedepankan diplomasi multilateral, sehingga berfokus pada memperdalam hubungan bilateral dan trilateral dengan Australia, India

dan Jepang (Duchâtel & Mohan, 2020). Kajian yang cukup komprehensif diberikan oleh Ulatowski (2022) yang membahas lebih dalam mengenai motif Jerman di Indo-Pasifik dan signifikansi kunjungan kapal fregat *Bayern* ke perairan Indo-Pasifik. Ulatowski (2022) memberikan latar belakang yang sama dengan Grare (2020), dan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif. Meskipun demikian, beberapa faktor seperti geoekonomi berupa Belt and Road Initiative (BRI) dan isu “kedaulatan digital”. Secara singkat, Jerman melihat Tiongkok sebagai mitra penting, kompetitor dan rival di tingkat sistemik. Meskipun tidak merubah *balance of power*, kunjungan kapal fregat *Bayern* ke beberapa negara Indo-Pasifik dilihat sebagai tindakan simbolik dalam rangka memperkuat hubungan Jerman dengan mitra-mitra demokratisnya di kawasan (Ulatowski, 2022). Menteri Pertahanan Annegret Kramp-Karrenbauer mengatakan bahwa Jerman siap untuk menjaga *freedom of navigation*, meskipun kunjungan kapal fregat Bayern sendiri tidak mendemonstrasikan *freedom of navigation* karena menghindari perairan sengketa, namun kehadirannya di Indo-Pasifik merupakan langkah awal yang berhati-hati bagi Jerman.

1.4 Kerangka Pemikiran

Jawaban atas rumusan masalah yang diajukan setidaknya dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut:

1.4.1 Strategic Culture

Dalam merespons potensi ancaman, merumuskan kebijakan keamanan, ataupun menggunakan kekuatan militer, setiap negara mempunyai cara-cara dan pemikiran-pemikirannya sendiri. Hal ini merujuk pada Konsep *strategic culture* atau budaya strategis. Konsep *strategic culture* menurut Booth (1990) dapat diartikan sebagai serangkaian tradisi, nilai, sikap, pola perilaku, kebiasaan, simbol, pencapaian, dan cara-cara tertentu yang dilakukan oleh sebuah negara dalam beradaptasi dengan lingkungannya dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan. Kemunculan konsep *strategic culture* dimulai oleh Jack Snyder ketika mengkaji strategi nuklir Uni Soviet. Konsep dari *strategic culture* sendiri masih merupakan sesuatu yang diperdebatkan. John Glenn memberikan beberapa klasifikasi mengenai konsepsi dari *strategic culture*. Pertama adalah *strategic culture* epifenomenal yang merujuk pada pendekatan yang dilakukan mengikuti karya Snyder tentang *strategic culture* Soviet dan memperlakukan *strategic culture* sebagai variabel intervensi yang menjelaskan variasi dari prediksi model neo-realisme (Schmitt, 2012). Kedua, berusaha untuk memperbaiki konsepsi pertama melalui pendekatan konstruktivisme tradisional, yang mana tindakan dan

keyakinan dibentuk oleh budaya dan “gagasan” beroperasi dari atas hingga bawah dalam membentuk aktor dan tindakan di politik dunia. Konstruktivisme berargumen bahwa budaya tercipta melalui sosialisasi, interaksi, persepsi dan pengalaman, sehingga dipandang sebagai suatu proses daripada yang sudah ada. Konsepsi *strategic culture* berdasarkan pos-modernisme sebagian besar berkaitan dengan cara diskursus dan representasi mereproduksi struktur dominasi dan dimanipulasi oleh aktor untuk memajukan agenda sendiri (Schmitt, 2012). Terakhir adalah interpretatif budaya strategis yang memerlukan adanya pencelupan ke dalam budaya yang diteliti untuk memahami dengan baik motivasi aktor, alasan dan pandangan dunia. Dalam konsepsi ini, budaya tidak dapat diperlakukan sebagai variabel di antara yang lain. Itu ada di mana-mana dalam analisis.

Ada tiga argumen mengenai cara budaya strategis mempengaruhi perilaku suatu aktor. Pada argumen pertama, norma-norma yang inheren pada budaya strategis membuat suatu aktor memiliki opsi-opsi yang terbatas dalam memberikan solusi bagi suatu permasalahan. Kedua, melihat bahwa budaya strategis memiliki pengaruh terhadap pembentukan organisasi yang memiliki tugas untuk menyelesaikan suatu masalah yang tengah dialami oleh suatu aktor. Berbeda dari kedua argumen sebelumnya, argumen ketiga memproposisikan tesis bahwa budaya strategis memiliki pengaruh yang lebih tidak langsung melalui kontribusi tentang bagaimana dipahaminya suatu keadaan strategis oleh pembuat kebijakan dan solusi yang didiskusikan oleh para pembuat kebijakan mengenai situasi tersebut (Angstrom & Honig, 2012). Penggunaan konsep budaya strategis secara umum dilakukan dalam tiga cara. Pertama, melihat budaya strategis sebagai variabel independen yang menyebabkan suatu perilaku tertentu. Kedua, menggunakannya sebagai variabel perantara, yaitu budaya strategis bertindak sebagai filter yang mana faktor-faktor lain, seperti organisasi dapat mempengaruhi perilaku. Ketiga, menyiratkan pendekatan konstruktivis yang mana perbedaan antara variabel dependen dan independen tidak mungkin dibuat (Angstrom & Honig, 2012).

1.4.1.1 Strategic Culture Jerman

Prominennya Prussia dalam unifikasi, mendorong Jerman unifikasi memiliki kultur strategis yang mirip dengan kultur strategis dari Prussia, yang direfleksikan oleh kepercayaan dan kemandirian kekuatan militer sebagai bagian dari kebijakan. Adanya hal tersebut membuat kultur strategis Jerman pada era ini dikarakterisasikan sebagai realpolitik yang bersifat pragmatis. Kultur ini berlanjut hingga Jerman memasuki Perang Dunia 2 (PD2). Di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, kekuatan militer juga dilihat sebagai cara yang sah dan efektif

untuk mencapai tujuan dari kebijakan, namun kultur strategis Jerman pada periode Nazi juga menekankan pada penggunaan kekuatan tanpa batas yang tercermin dari tindakan Nazi Jerman di Front Timur PD2 (Sondhaus, 2006). Berakhirnya PD2 menjadi katalis bagi perubahan fundamental di dalam kultur strategis Jerman. Berbeda dari Perang Dunia I, Jerman pasca kekalahan di Perang Dunia II tidak memiliki angkatan bersenjata, wilayah yang secara signifikan lebih kecil daripada perbatasannya sebelum tahun 1938, hancurnya kota-kota dan industri, dan tidak adanya pemerintah. Jerman pada periode ini juga diduduki oleh Sekutu di seluruh wilayahnya, dan pada akhirnya dibelah. Masyarakat Jerman pada periode ini juga dihantui dengan perasaan malu dan bersalah atas tindakan kejam yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Kehancuran yang luas dan sentimen yang dirasakan masyarakat Jerman pasca PD2 berfungsi menjadi suatu kejutan eksternal dengan tingkat yang dapat mengubah kultur strategis suatu negara (Sondhaus, 2006).

Ketika Jerman diperbolehkan untuk mempunyai angkatan bersenjata dan bergabung dengan NATO pada 1955, pemerintah Jerman mempunyai tugas berat untuk membangun kekuatan militer dari awal, namun tidak terbebani oleh beban kekulturan dari masa lalu (Sondhaus, 2006). Menurut Schmitt (2012), pengalaman buruk adanya Nazi dan integrasi ke dalam berbagai struktur multilateral telah mengubah kultur strategis kontemporer Jerman. Saat ini, kultur strategis Jerman memiliki beberapa fitur berupa penolakan terhadap unilateralisme; mempromosikan stabilitas; membatasi hal-hal yang berkaitan dengan militer, dan juga didukung oleh sentimen anti-militer yang luas; berdedikasi untuk membuat dan mewujudkan kebijakan keamanan yang bertanggung jawab dan dapat diprediksi; mengintegrasikan *Bundeswehr* atau angkatan bersenjata Jerman secara penuh ke dalam masyarakat; dan mengutamakan kerja sama dan pembangunan konsensus dalam isu-isu keamanan (Schmitt, 2012). Fitur-fitur lantas menunjukkan kultur strategis yang secara garis besar enggan untuk menggunakan kekuatan militer dan lebih menjalin kerja sama atau mengambil tindakan secara multilateral. Hal tersebut lantas menunjukkan bahwa kultur strategis Jerman kontemporer sangat berbeda dari kultur strategis Jerman pra-1945 yang bersifat sangat militeristik.

Bagi Jerman, NATO melayani Atlantik dan kepentingan Eropa, serta memberikan kesempatan untuk mendorong hubungan bilateral yang diinginkan oleh Jerman dengan Amerika Serikat serta hubungan multilateral dengan tetangga kontinentalnya. Kerry Longhurst (dalam Sondhaus, 2006) menekankan adanya *Bundeswehr* menunjukkan bahwa angkatan bersenjata baru Jerman memiliki tujuan defensif dan musuh yang jelas, dan beroperasi secara penuh di dalam persekutuan Barat sehingga tidak dapat beroperasi secara independen. Hal ini

menunjukkan Tujuan Adenauer untuk mengintegrasikan Jerman Barat dengan demokrasi Barat lainnya, dan pembangunan tentara demokratis di bawah kendali mutlak para pemimpin sipil, yang mana hal ini merupakan langkah penting dalam pengembalian kedaulatan Jerman karena menunjukkan bahwa Jerman dapat berfungsi seperti negara-negara demokrasi lainnya. Adanya *Bundeswehr* juga mencerminkan adanya sikap pesimisme terhadap militer yang muncul di dalam Jerman pasca PD2. Konstitusi Federal atau Hukum Dasar (*Grundgesetz*) melarang partisipasi Jerman dalam peperangan "agresif" dan melarang kepemilikan senjata nuklir. Selain itu, berbeda dari *Reichswehr* yang dibentuk pasca Perang Dunia I, *Bundeswehr* merupakan tentara wajib militer berdurasi pendek. Tentara *Bundeswehr* diperlakukan sebagai *citizen-soldiers*, dan menikmati hak untuk *conscientious objection* maupun layanan sipil alternatif untuk negara. Sebuah konsep moral baru yang disebut dengan "kepemimpinan internal" (*Innere Führung*) menekankan hak dan tanggung jawab individu prajurit (Sondhaus, 2006). Munculnya *strategic culture* Jerman yang baru ini merupakan salah satu bentuk manifestasi dari *Erinnerungskultur* atau "budaya mengingat" masa lalu.

Adanya multilateralisme dan anti-militerisme lantas mempengaruhi pengambil kebijakan dalam menentukan politik luar negeri Jerman. Kebijakan luar negeri Jerman, terutama yang terkait dengan isu keamanan atau militer, selalu merupakan bagian dari suatu upaya multilateral. Personil militer Jerman saat ini bertugas di dua belas operasi di tiga benua dengan berbagai macam tugas, seperti melatih militer negara lain, memantau berbagai wilayah maritim, mencegah pembajakan dan melindungi pengiriman Program Pangan Dunia, dan berpartisipasi dalam operasi NATO ataupun inisiatif multilateral lainnya (*Bundeswehr*, t.t.). Berdasarkan data yang dilansir oleh Statista (2022), *Bundeswehr* berpartisipasi dalam berbagai operasi yang dilakukan oleh PBB, UE, dan NATO. Meskipun Jerman dapat mengarahkan militer secara multilateral, proses yang memungkinkan agar pengerahan ini dapat terealisasi tidak lepas dari unsur anti-militerisme yang ada di Jerman. Bundestag yang merupakan organ legislatif pemerintahan Jerman memiliki kewenangan untuk menyetujui atau mengveto proposal pengerahan militer Jerman. Berpartisipasi dalam lebih dari 140 pemungutan suara sejak akhir Perang Dingin, *Bundestag* telah menjadi kekuatan yang luar biasa aktif dalam mengendalikan pengerahan angkatan bersenjata (Wagner, 2017). Peran *Bundestag* yang prominen menunjukkan bahwa *strategic culture* Jerman sendiri memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan persepsi publik domestik mengenai suatu isu, terutama yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan militer ke luar Jerman. Dalam prosedur pemungutan suara untuk menyetujui pengerahan militer, *Bundestag* mempunyai prosedur berupa *voting roll call*

(*namentliche Abstimmun*). Meskipun prosedur ini memakan waktu, namun prosedur ini menggarisbawahi pentingnya keputusan yang diambil, dan juga memperlihatkan keputusan setiap anggota perleman dan tingkat kesatuan setiap partai dalam isu tersebut (Wagner, 2017).

1.5 Hipotesis

Jerman yang merupakan negara Eropa dengan kepentingan di kawasan Indo-Pasifik memiliki pola keterlibatan berupa *engagement* multilateral dengan negara-negara di kawasan dan memiliki kehadiran militer yang sangat minim dapat dijelaskan melalui *strategic culture* yang terdiri atas unsur multilateralisme; dan keengganan untuk menggunakan kekuatan militer dalam kebijakan luar negeri (anti-militerisme), yang mana jangkauan anti-militerisme Jerman sangat dipengaruhi oleh preferensi elit politik dan persepsi publik.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Operasionalisasi Konsep

1.6.1.2 Indo-Pasifik

Konsepsi dan definisi dari wilayah Indo-Pasifik sangat beragam dan tergantung oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Definisi wilayah Indo-Pasifik yang digunakan dalam tulisan ini adalah definisi yang berikan oleh Pemerintah Jerman yaitu seluruh wilayah yang dicirikan oleh Samudra Hindia dan Pasifik (Federal Foreign Office, 2020). Penulis menggunakan definisi ini dikarenakan sifatnya yang realtif inklusif dikarenakan tidak digunakan negara-negara tertentu sebagai paramater dalam mendefinisikan wilayah Indo-Pasifik, dan tidak adanya penyebutan negara tertentu dalam definisi ini juga dapat menjadi indikasi bahwa Jerman ingin melakukan *engagement* yang lebih luas di wilayah Indo-Pasifik. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat mendefinisikan Indo-Pasifik dalam dokumen *National Security Strategi* miliknya sebagai wilayah yang terbentang dari pantai barat India hingga pantai barat Amerika Serikat. Melalui penyesuaian ini, “Indo-Pasifik” diperbesar di Samudra Pasifik, sedangkan menyusut di Samudra Hindia. Selain itu, definisi ini juga mengeksklusikan wilayah bagian barat Samudera Hindia, Timur Tengah dan Afrika (Haruko, 2020).

1.6.1.3 Strategic Culture

Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan definisi *strategic culture* milik John Glenn. Definisi yang dikemukakan oleh John Glenn memiliki karakteristik yang sama dengan berbagai konsepsi yang sudah dikemukakan oleh penulis sebelumnya. Definisi yang digunakan adalah *strategic culture* sebagai seperangkat keyakinan dan asumsi bersama yang berasal dari

pengalaman bersama dan narasi yang diterima (baik lisan maupun tulisan), yang membentuk identitas kolektif dan hubungan dengan kelompok lain, dan juga mempengaruhi tujuan dan cara yang dipilih untuk mencapai tujuan keamanan, sehingga *strategic culture* menciptakan norma perilaku yang tepat untuk diikuti oleh agen. Ciri unik dari definisi ini adalah budaya dilihat sebagai “seperangkat norma”, dikarenakan definisi ini menghindari konsepsi *strategic culture* sebagai blok yang seragam dan monolitik (Schmitt, 2012).

1.6.1.3.1 Multilateralisme

Multilateralisme secara sederhana berarti suatu pola interaksi diplomasi terkoordinasi antara tiga atau lebih aktor. Oleh karena itu, pemahaman tentang multilateralisme ini merupakan kategori yang murni formal, karena kebijakan multilateral adalah tentang “bagaimana” bukan “apa”, dan lebih mengenai perilaku daripada substansi dan tujuan politik internasional. Sehingga, versi multilateralisme ini adalah pendekatan diplomatik untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak ditentukan. Pemahaman multilateralisme oleh Jerman memiliki perbedaan dibandingkan definisi sebelumnya. Definisi multilateralisme oleh Jerman menggabungkan interaksi diplomatik terkoordinasi antara tiga aktor atau lebih dengan kegiatan di dalam kerangka kerja suatu organisasi internasional, yang mana definisi ini berorientasi pada prinsip dan norma. Interaksi ini juga dilakukan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Berdasarkan definisi ini, kebijakan luar negeri multilateral berdiri tidak hanya untuk pendekatan diplomatik tertentu, tetapi juga untuk komitmen terhadap prinsip-prinsip tertentu, tujuan substantif dan metode kebijakan luar negeri, dan untuk serangkaian nilai yang mendasarinya (Maull, 2020). Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan definisi multilateralisme yang digunakan oleh Jerman, yang mana multilateralisme didefinisikan sebagai sebuah pola diplomasi yang melibatkan tiga aktor atau lebih, dan dilakukan berdasarkan prinsip maupun norma yang berlaku secara internasional.

1.6.1.3.2 Anti-Militerisme

Keengganan untuk menggunakan kekuatan militer dapat disebut juga dengan anti-militerisme yang dapat didefinisikan sebagai antitesis militerisme, dan diartikan oleh Kamus Oxford sebagai “keyakinan atau keinginan oleh pemerintah maupun rakyat bahwa suatu negara harus memelihara kemampuan militer yang kuat dan siap untuk menggunakannya secara agresif dalam membela atau memajukan kepentingan nasional.” Konsepsi tradisional militerisme adalah sebagai ideologi “yang memuliakan perang, institusi militer, dan prevalensi nilai-nilai bela diri di masyarakat” (Becker, 2013). Konsep anti-militerisme sendiri harus dibedakan

dengan jelas dari pasifisme yang merupakan penolakan terhadap penggunaan kekuatan bersenjata secara umum. Sentimen anti-militerisme di dalam Jerman memanifestasikan dirinya sebagai skeptisisme terhadap penggunaan kekuatan militer sebagai alat kebijakan luar negeri dan mengakibatkan hubungan sipil-militer unik yang menekankan pentingnya prajurit warga (Becker, 2013). Oleh karena itu, anti-militerisme di dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sikap skeptisisme dan keengganan terhadap penggunaan kekuatan militer sebagai alat kebijakan luar negeri.

1.6.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif, yakni penelitian yang digunakan untuk menguji suatu hipotesis dengan menguji keterkaitan antar variabel. Oleh karena itu, penelitian akan menggunakan teori dalam membahas permasalahan dalam penelitian, yang dalam hal ini berkaitan kebijakan Indo-Pasifik Republik Federal Jerman.

1.6.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pemerintah Republik Federal Jerman, terutama yang berkaitan dengan perilakunya di kawasan Indo-Pasifik. Jangkauan pada penelitian ini dimulai sejak pemerintah Republik Federal Jerman menerbitkan Panduan Kebijakan Indo-Pasifik pada bulan September 2020, hingga bulan Juni 2022 atau kurang lebih hampir dua tahun setelah kebijakan tersebut dikeluarkan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di dalam penelitian ini didapatkan dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa publikasi, pidato atau pernyataan, maupun artikel yang dikeluarkan oleh badan maupun pengambil kebijakan di pemerintahan Jerman. Sumber primer ini diambil dari situs-situs daring resmi atau video yang dikeluarkan oleh pemerintah Jerman sendiri. Sementara itu, sumber sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, laporan pihak ketiga, *expert opinion*, dan artikel daring maupun sumber kredibel lain yang ada di internet.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisis data *qualitative analysis*. Teknik ini akan melakukan pada interpretasi dan pemaknaan terhadap data dan teori yang dipilih. Oleh sebab itu dalam teknis analisis data kualitatif, dibutuhkan reduksi data untuk mencari data-data yang relevan dan kredibel, kemudian menyajikan data tersebut dan

menganalisisnya dengan teori dalam rangka mencapai suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian penulis.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi ke dalam bab. Bab pertama berisi pendahuluan seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan kepustakaan, kerangka teoritis, hipotesis dan metodologi penelitian. Pada bab kedua, penulis akan menjelaskan bagaimana implementasi multilateralisme Jerman dalam politik luar negeri. Bab tiga berisi tentang anti-militerisme Jerman untuk mengerahkan kekuatan militernya dalam menjaga keamanan internasional. Bab empat membahas bagaimana multilateralisme dan anti-militerisme Jerman menentukan pola *engagement* Jerman di Indo-Pasifik. Bab lima, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian.